

WTP Bukan Hanya Hasil Kerja Eksekutif

PONTIANAK - Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepada Pemerintah Kota Pontianak tahun ini bukan semata-mata hasil kerja eksekutif. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin mengatakan, WTP dari BPK tersebut hasil kerja banyak pihak termasuk eksekutif dan legislatif.

"Legislatif juga terlibat dalam opini WTP itu. Karena bahu-membahu memberdayakan APBD juga ada peran legislatif di dalamnya," kata Herri, kemarin.

Dengan opini WTP tersebut, kata dia, menunjukkan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD baik. Kemitraan keduanya berjalan sesuai harapan

masyarakat. Hal itu juga akan membangun akuntabilitas serta kredibilitas pemerintahan itu sendiri. "WTP memang prestasi untuk semua komponen di Pemerintahan Kota Pontianak," ujarnya.

Herri mengingatkan, ke depannya eksekutif tidak terpacu mempertahankan opini WTP. Namun harus berbuat lebih,

bagaimana mengoptimalkan daya serap ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat. "Itu sesungguhnya yang paling penting. Dengan WTP kepercayaan masyarakat semakin meningkat kepada pemerintah, tetapi jangan lupa juga kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan," ingatnya. (*hen*)